

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

1. Arah Pendidikan Ekonomi (Koperasi)

Tantangan pembangunan ekonomi nasional pada akhir abad 20 sangat unik dan kompleks. Pada akhir abad 20 ini pembangunan ekonomi nasional tidak hanya dihadapkan pada persoalan bagaimana meningkatkan taraf hidup rakyat menjadi lebih baik, namun juga dihadapkan kepada era globalisasi dalam segala hal. Ciri utama era ini adalah terjadinya persaingan terbuka yang sangat ketat. Kekayaan sumber daya alam dari suatu negara bukan lagi merupakan unggulan utama untuk mampu bersaing. Kemampuan bersaing sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mempersiapkan dan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas, yakni SDM yang mampu menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) (Ahmad, 1995:8; Lukita, 1995:12). Dengan kata lain kemampuan bersaing itu sangat ditentukan oleh kemampuannya mempersiapkan manusia yang adaptif, mampu menerima, menyesuaikan, mengembangkan dan mengantisipasi kebutuhan atau arus perubahan lingkungannya (Wiryosumarto, 1995:35; Feisal, 1995: 46). Menurut Arismunandar (1995:5) dan Mulyani (1996) *dimensi utama yang perlu diperhatikan dalam era globalisasi ini bukan hanya penguasaan Iptek dalam memproduksi sesuatu, namun juga bagaimana kita mampu menjalankan bisnis itu dengan baik dan professional.* Benar atau tidak pemikiran, setelah kita mampu memproduksi sesuatu, persoalan selanjutnya adalah bagaimana membisniskannya.



Untuk bisa berbisnis secara profesional semua orang perlu belajar dan berlatih. Kemampuan SDM harus dimulai dari penyelenggaraan pendidikan yang baik (Ansyar, 1995: 18). Memberikan kesempatan belajar dan berlatih serta mengupayakan pemikiran tentang bagaimana caranya agar generasi muda (khususnya para siswa) dapat memperoleh pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam berbisnis secara profesional menjadi tanggung jawab kita bersama.

Untuk meningkatkan kemampuan para siswa (berbisnis), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia telah menggalakkan adanya program *link and match* (Djojonegoro, 1994:3) Program ini merupakan program kerja sama antara lembaga-lembaga pendidikan dengan para pengusaha dan lembaga pemerintahan untuk (1) memberikan kesempatan kepada para siswa belajar dan berlatih di perusahaan (di lapangan) dalam bentuk magang (2) meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para siswa, (3) meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan program pendidikan yang didikkan kepada para siswa dengan kebutuhan pengetahuan dan ketrampilan yang diharapkan lembaga penerima calon tenaga kerja. Program ini sangat baik, namun tidak berjalan mulus, karena adanya berbagai kendala. Pertama (1) *jumlah siswa yang akan magang tidak sebanding dengan jumlah lembaga yang mau menerima calon magang*, (2) *para pengusaha tidak selalu dengan senang hati menerimanya*: mereka melihat hanya dari kacamata profit, keberadaan magang dilihat sebagai hal yang mengganggu ketimbang mendatangkan keuntungan (Ahmad, 1995:10), (3). Pada umumnya mereka *yang mau menampung para magang sering kali hanya bersifat formalitas* (dalam proses belajar dan berlatih, para pemagang tidak diizinkan mengetahui semua persoalan yang seharusnya mereka pelajari, banyak hal yang dirahasiakan karena penerima magang

khawatir akan diketahui rahasianya). Sebagai konsekuensinya pengetahuan para pemegang menjadi tidak utuh (Jamaro AD, 1993; Zainuddin, 1996). Kondisi yang demikian mengakibatkan tidak semua siswa memperoleh kesempatan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh di sekolahnya, termasuk juga kemampuan berbisnis.

Pendidikan ekonomi di sekolah, di mana ilmu ekonomi ditempatkan sebagai bahan ajar, mempunyai kepentingan untuk menyiapkan kemampuan professional dalam memasuki bidang profesi ekonomi, meningkatkan pengetahuan ilmu ekonomi, dan pembentukan sikap dan mentalitas keilmuan (tumbuhnya sikap berfikir ekonomis yaitu rasionalitas, efisiensi, efektivitas, kreatifitas dan produktifitas) (Anwar, 1993: 57-58 dan 1994:2). Dari pengertian ini nampak bahwa pendidikan ekonomi di samping berfungsi sebagai pembentukan sikap dan mentalitas ekonomi kepada para siswa, juga berfungsi sebagai peningkatan pengetahuan prinsip-prinsip ekonomi (yang dalam Kurikulum SLTP & SLTA 1994 dinyatakan sebagai bekal melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi). Sehingga dengan demikian pendidikan Ekonomi-koperasi merupakan pendidikan yang berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan prinsip-prinsip Ekonomi-koperasi, sikap dan mentalitas siswa berusaha dalam bentuk koperasi.

Pada tingkat sekolah, untuk mencapai tujuan pendidikan ekonomi, sebenarnya para pendidik tidak perlu tergantung pada lembaga lain yang mau menerima siswa berpraktik (magang). Karena pada tahun 1960, pemerintah melalui Instruksi Presiden No 3 telah menginstruksikan agar koperasi dimasukkan ke sekolah sebagai pendidikan bagi para siswa. Koperasi ini kemudian diberi nama koperasi siswa (Kopsis). Salah satu dari fungsi Kopsis adalah sebagai laboratorium ekonomi

siswa. Namun berdasarkan prasarvei (April, 1996) bahwa pada umumnya 1) *para guru pendidikan IPS (khususnya guru mata pelajaran ekonomi - koperasi) kurang memanfaatkan Kopsis sebagai media proses pendidikan para siswa, 2) para pembina Kopsis tidak memiliki program-program pembinaan para siswa yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu secara jelas; 3) para pembina Kopsis tidak memiliki model pembelajaran dan metode pembinaan yang kongkrit dalam membina perilaku siswa dalam berkoperasi.* Hasil prasarvei itu juga ditemukan bahwa pada umumnya partisipasi siswa dalam Kopsis rendah, baik partisipasi insentif maupun kontributif. Hasil prasarvei ini memberikan gambaran bahwa para guru ekonomi dan pembina Kopsis dalam melaksanakan pendidikan koperasi di sekolah masih bersifat konseptual, kurang memberikan kesempatan belajar dan berpraktik kepada para siswa untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilannya berbisnis melalui berpartisipasi dalam Kopsis. Padahal, pendidikan ekonomi dengan membimbing siswa berpartisipasi dalam koperasi akan memungkinkan mereka memiliki kemampuan berwirausaha dan atau belajar bagaimana mengelola suatu unit usaha. Dimana pengalaman ini merupakan inti kemampuan dan ketrampilan yang diharapkan dalam pendidikan ekonomi. Kemampuan siswa berbisnis atau kemampuan berwirausaha akan dapat menjadi bekal mereka dalam menghadapi era globalisasi yang unik dan kompleks. Partisipasi siswa dalam koperasi akan merupakan kunci perkembangan dan keberhasilan koperasi (sekolah) (Subyantoro, 1993: 17; Harsono, 1985; Hasan, 1986; Syamsuri, 1986:167; Jacob, 1986:3). Dengan demikian keberhasilan pendidik ekonomi dan pembina Kopsis dalam meningkatkan partisipasi siswa akan memberikan makna penting bagi keberhasilan dan perkembangan Kopsis yang pada gilirannya akan meningkatkan maknanya bagi tempat berpraktik siswa.

5

Permasalahannya adalah *aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan guru dan pembina Kopsis dalam melaksanakan pendidikan ekonomi kepada siswa untuk meningkatkan perilaku (partisipasi) berkoperasi, pengalaman dan ketrampilan berbisnis dan perkembangan Kopsis?*

2. Peranan Partisipasi Anggota dalam Koperasi.

Prestasi yang dicapai Koperasi Indonesia sangat bervariasi baik secara kuantitas maupun kualitas. Ada yang berhasil, kurang berhasil dan gagal. Secara kuantitatif pertumbuhan koperasi Indonesia sangat mengesankan, namun secara kualitas masih kurang menggembirakan (Nasution, KaBalitbangkop Depkop, 1989). Pidato Presiden RI Agustus 1993 menyatakan bahwa kualitas perangkat organisasi yang dimiliki koperasi dan koperasi yang mengikutsertakan anggota dalam mengambil keputusan masih rendah.

Logikanya lembaga-lembaga koperasi di Indonesia tidak akan terjadi demikian, karena pemerintah, melalui Instruksi Presiden no 3 tahun 1960, SKB Menkopdag dan Mendikbud no 719 tahun 1979 dan SKB Menkop, Mendagri dan Mendikbud nomor 125 tahun 1984, telah lama membuat kebijakan agar koperasi masuk ke dalam kurikulum sekolah dan kegiatan sekolah, universitas dan lain-lain kelembagaan pendidikan, dan lembaga lain, yang bertujuan memberikan pendidikan dan latihan siswa dalam berkoperasi. Ini berarti bahwa secara yuridis pemerintah telah lama memikirkan tentang pentingnya usaha penanaman pendidikan kesadaran berkoperasi kepada generasi muda untuk dilakukan sejak usia dini. Namun kenyataannya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya terrealisir. Masih sedikit lembaga pendidikan yang telah berhasil dalam menyelenggarakan Kopsis. Di

kotamadya Bandung misalnya, sekolah yang telah *secara resmi* menyelenggarakan Kopsis dan telah mendapatkan pengakuan dari Departemen Koperasi baru 16 sekolah, tingkat SLTP 3 buah dan SLTA 13 buah dari jumlah SLTA yang ada (Kandepkop Kotamadya Bandung, 1996). Jumlah ini sangat kecil sekali dibandingkan dengan jumlah sekolah lanjutan (negeri maupun swasta) di Kotamadya Bandung yang telah mencapai 535 buah, yaitu SLTP 319 buah dan SLTA 216 buah (Biro Statistik Propinsi Jawa Barat, 1995). Sedikitnya Kopsis yang telah berhasil merupakan gambaran betapa rendahnya jumlah anak sekolah yang telah memperoleh pengalaman secara langsung dalam kehidupan koperasi, apalagi pengalaman langsung berkoperasi pada koperasi yang telah berkembang dengan baik. Rendahnya pengalaman langsung yang diperoleh oleh para siswa berarti rendahnya pencapaian tujuan dan fungsi Kopsis yang merupakan wahana pendidikan dan latihan siswa dalam kehidupan berkoperasi, penanaman jiwa wirausaha dan nilai-nilai demokrasi ekonomi terhadap anak didik dalam kehidupan nyata.

Sedikitnya jumlah sekolah yang menyelenggarakan Kopsis disebabkan pertama kurangnya wawasan para kepala sekolah, pembina Kopsis, guru dan siswa tentang Kopsis; kedua mereka kurang mengetahui bagaimana mendirikan Kopsis (Ahdiyati, 1990). Dari hasil wawancara dengan beberapa guru di sekolah lanjutan Kotamadya Bandung diperoleh informasi bahwa kurang berkembangnya Kopsis disebabkan kurangnya partisipasi siswa dalam kehidupan dan kegiatan Kopsis. Rendahnya partisipasi siswa dalam Kopsis ini didukung hasil prasurvei terhadap 60 siswa SLTA di Kotamadya Bandung (masing-masing 10 siswa dari SMKN 2, 5, SMU Negeri 3, 7, 15, dan SMU Bina Dharma I) pada bulan April tahun 1996. Dari hasil survei itu diperoleh informasi bahwa di beberapa sekolah seperti SMK Negeri 2,

partisipasi para siswa dalam Kopsis sangat tinggi. Namun kebanyakan sekolah yang lain menunjukkan bahwa partisipasi para siswa dalam Kopsis sangat rendah baik partisipasi dalam uang simpanan sukarela, kehadiran rapat maupun dalam transaksi.

Selain itu fakta empirik juga menunjukkan bahwa perkembangan yang kurang mengembirakan disebabkan oleh faktor intern seperti rendahnya loyalitas dan partisipasi anggota, kurangnya wawasan bagi SDM koperasi tentang koperasi (sekolah), kurangnya pembinaan SDM koperasi, kurangnya profesionalitas, kredibilitas pengurus dan kurang efektifnya perangkat organisasi koperasi (Aziz, 1983; Harsono, 1985; Nasution, 1990). Menurut Harsono (1985) bahwa hambatan itu terjadi karena rendahnya partisipasi anggota dalam menghadiri rapat anggota, dalam pembelian dan penjualan maupun dalam pemupukan modal. Sedangkan menurut Nasution (1990) lemahnya rasa memiliki oleh para anggota terlihat bahwa mereka banyak yang belum membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, rendahnya pemahaman terhadap AD/ART dan kecilnya transaksi anggota.

Temuan di atas sejalan dengan temuan Azis (1983): tingkat partisipasi anggota koperasi masih sangat rendah. Dari 20 koperasi kerajinan yang diteliti di DKI Jaya dan Jawa Barat hanya 3 koperasi yang telah membayar simpanan wajib lebih dari 60 %; 6 buah koperasi antara 20-60 %; 7 buah koperasi kurang dari 20 persen dan 4 buah koperasi tak pernah membayar. Bila dilihat dari kehadiran dalam rapat-rapat anggota: sepertiga menyatakan bahwa kehadirannya itu karena diwajibkan oleh pengurus dan sepertiga lagi karena ingin tahu isi rapat. Dari data di atas terlihat jelas, betapa partisipasi anggota dalam koperasi itu sangat minim, padahal menurut Harsono (1985) Partisipasi anggota mutlak diperlukan baik dalam penyusunan kebijaksanaan dan rencana kerja koperasi, RAT maupun gerak langkah

koperasi untuk melaksanakan kebijaksanaan dan rencana kerja tersebut. Selain itu dia juga mengatakan bahwa partisipasi anggota sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi koperasi. Kesimpulan hasil studi yang dilakukan oleh Economic Development Foundation menyatakan: Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan koperasi adalah kurang setianya anggota terhadap Koperasi. (the EDP Economic dalam Harsono, 1985). Partisipasi anggota koperasi merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu koperasi. "Semakin besar partisipasi anggota semakin memudahkan koperasi untuk berkembang (Subyantoro, 1993). Hasil studi tersebut sejalan dengan Machima (1986) yang mengemukakan arti pentingnya partisipasi anggota dalam organisasi koperasi:

"Member participation is a basic requirement for cooperative work. Success or failure of cooperative operations depends very much on member participation. Therefore, in order to achieve the objectives members must participate in the cooperative in all aspects".

Pendapat tersebut mengemukakan bahwa berhasil tidaknya kegiatan koperasi sangat tergantung pada adanya partisipasi anggota. Partisipasi anggota merupakan persyaratan dasar bagi kerja koperasi. Agar koperasi dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan maka para anggota koperasi harus berpartisipasi dalam semua aspek kegiatan koperasi. Gambaran di atas menunjukkan bahwa partisipasi anggota sangat penting bagi perkembangan dan keberhasilan koperasi. Masalah partisipasi merupakan masalah perilaku yang berfokus pada kesadaran sosial. Perkembangan kesadaran ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman dari hasil interaksi antara dirinya dengan lingkungannya (Freire, 1972:71-123). Lingkungan individu yang memberikan akses besar pengalaman berkoperasi memiliki andil yang berharga bagi pertumbuhan kesadaran berpartisipasi dalam koperasi. Sama halnya dengan para siswa yang

memiliki akses pengalaman berkoperasi di sekolahnya, kesadaran berkoperasi dan kesadaran berpartisipasi dalam koperasi akan tumbuh karenanya. Freire (1972:92) mengisyaratkan pengalaman realistik lingkungannya akan memberikan gambaran makna tentang objek yang dialami bagi dirinya dalam menghadapi lingkungan tersebut (Paulo Freire, 1972: 97-98). Oleh karena itu agar para siswa tumbuh kesadaran berkoperasi (termasuk kesadaran berwirusaha) dan atau berpartisipasi, kondisi lingkungan yang mendukung pemerolehan pengalaman berkoperasi sangat penting artinya. Penerapan model pembelajaran dan metode pembinaan berkoperasi yang efektif oleh para guru dan pembina Kopsis kepada para siswa akan mendukung pencapaian tujuan peningkatan pengalaman berkoperasi dan partisipasi berkoperasi bagi para siswa. Agar kesadaran berkoperasi dan atau partisipasi siswa dalam Kopsis meningkat perlu dicari model pembelajaran, metode dan strategi pembinaan yang efektif dengan mengadakan penelitian secara dalam. Dengan harapan, melalui model pembelajaran dan metode pembinaan perilaku siswa dalam berkoperasi dan berpartisipasi dalam Kopsis secara tepat, mereka akan memiliki pengalaman dan ketrampilan, kesadaran berkoperasi, dan berwirausaha. Pengalaman generasi muda yang demikian ini sangat penting artinya bagi penyiapan SDM dalam menyongsong era globalisasi yang penuh tantangan. Permasalahannya adalah *model pembelajaran dan metode pembinaan perilaku siswa yang seperti apakah yang aktual dilakukan oleh para guru (ekonomi) dan pembina Kopsis dalam meningkatkan partisipasi siswa dalam berkoperasi selama ini?*

3. Relevansi Pemanfaatan Kopsis Dengan Kebutuhan Pembangunan

Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menerangkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional perlu disesuaikan dengan jiwa dan isi Sistem Pendidikan Nasional. Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1993 mengamanatkan bahwa:

"Pendidikan nasional perlu terus ditata, dikembangkan dan dimantapkan ... upaya itu perlu didukung oleh peningkatan sumber daya pendidikan secara bertahap disertai keterpaduan dan efisiensi pelaksanaannya sehingga mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan pembangunan."

Berdasarkan uraian tersebut berarti relevansi pendidikan tetap mendapat perhatian secara konsisten. Bahkan pada tahun 1993 Mendikbud telah memperkenalkan konsep *link and match* yaitu suatu konsep pendidikan yang menghendaki hasil pendidikan itu berkaitan dan sepadan dengan kebutuhan pembangunan di masyarakat. Salah satu tantangan pendidikan yang berhubungan dengan relevansi adalah adanya kecenderungan bahwa isi program pendidikan dinilai cenderung berorientasi pada penguasaan prestasi akademik untuk memasuki pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan belum menata arah untuk lebih cepat menyesuaikan dengan tuntutan dunia kerja yang terus berubah dalam kehidupan masyarakat. (Djojonegoro & Suryadi, 1995: 112)

Tantangan tersebut memberikan pemikiran kepada kita perlunya upaya peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik dari segi proses maupun hasil. Proses pendidikan dikatakan bermutu apabila proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan ditunjang oleh sumber daya yang memadai. Peserta didik dikatakan memperoleh hasil pendidikan berkualitas apabila memiliki nilai tambah iptek yang dapat digunakan sebagai persiapan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang

lebih tinggi dan memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dapat dimanfaatkan dalam hidup di masyarakat. (Djojonegoro dan Suryadi, 1995:27-34) Sehubungan dengan itu berarti bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah para pendidik perlu menyediakan proses pembelajaran yang mampu memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar sebagaimana yang diharapkan.

Untuk meningkatkan upaya tersebut, dalam Pendidikan Ekonomi, salah satu dari berbagai kegiatan yang dapat menunjang adalah dengan memberikan pendidikan dan latihan berkoperasi kepada para siswa. Melalui cara ini, di samping peserta didik meningkat pengetahuannya, mereka dapat berkembang pengalaman dan ketrampilan berkoperasi, berwirausaha, berorganisasi dan hidup dalam suasana demokratis. Ini semua dapat mereka terapkan dalam hidup di masyarakat. Dengan kata lain hasil pendidikan yang mereka peroleh relevan dengan kebutuhan pembangunan yaitu pembangunan SDM yang memiliki kemampuan dan ketrampilan berkoperasi dan berwirausaha. Diperolehnya hasil pendidikan yang demikian sangat penting artinya bagi penyiapan SDM dalam menghadapi era globalisasi.

Walaupun demikian baru 16 sekolah dari 535 SLTP & SLTA di Kotamadya Bandung yang secara formal telah menyelenggarakan Kopsis (Kandepkop Kodya Bandung, 1996). Umumnya sekolah menyelenggarakan Kopsis sebagai ekstrakurikuler, bukan kokurikuler (Hasil survei ke SLTA Kodya Bandung, April 1996). Dengan demikian memberikan kemungkinan tidak semua siswa mau mengembangkan kemampuan dan ketrampilan berkoperasi, sehingga tidak semua siswa memiliki kemampuan dan ketrampilan berkoperasi. Atau dengan istilah lain banyak para siswa hanya memiliki pengetahuan koperasi bersifat konseptual. Permasalahannya adalah *model pembelajaran dan metode pembinaan siswa dalam*

berkoperasi seperti apakah yang diusahakan dan dilakukan oleh para guru ekonomi (koperasi) dan pembina Kopsis agar para siswa mampu dan mau berpartisipasi dalam kehidupan dan kegiatan Kopsis yang sesuai dengan fungsi dan tujuan Kopsis?

4. Pentingnya Peningkatan Partisipasi Siswa dalam Kopsis

Morrisett et. al (1968: 238) mengemukakan: Education can be defined ... as any efforts to structure situations so that the speed of learning is greater, or the content, than it would be in the absence of such efforts. Dalam pengertian tersebut terkandung makna bahwa pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk mempercepat proses dan hasil belajar subjek didik, dan usaha-usaha itu harus dilakukan bila diinginkan apa yang diharapkan itu dapat mencapai hasil yang maksimal. Ini berarti bahwa fungsi, maksud, tujuan dan makna Kopsis tersebut di atas akan lebih dapat tercapai bila para pendidik koperasi (pembina dan guru koperasi) melakukan berbagai usaha yang efektif untuk mencapainya. Untuk mencapai itu para guru ekonomi dan pembina Kopsis perlu mengusahakan dan menerapkan model pembelajaran dan metode pembinaan perilaku siswa dalam berkoperasi yang efektif sehingga partisipasinya berkoperasi meningkat. Dengan kata lain pembinaan dan peningkatan partisipasi siswa dalam Kopsis melalui penerapan suatu model pembelajaran dan metode pembinaan perilaku yang efektif perlu ditumbuhkembangkan secara terus menerus. Peningkatan dan pembinaan partisipasi siswa dalam berkoperasi perlu dilakukan sejak usia dini. Hal ini karena (1) penyelenggaraan Kopsis merupakan salah satu pelaksanaan program dari 8 program pembinaan kesiswaan (program OSIS), yaitu pembinaan kewirausahaan siswa. Program ini harus dilakukan di sekolah (Informasi Kandep Dikbud Kodya Bandung,

29 April 1996). (2) *Secara paedagogis*, peningkatan partisipasi siswa dalam Kopsis berfungsi sebagai wahana pendidikan, pembinaan dan pelatihan generasi muda untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis berkoperasi serta sikap menghargai koperasi melalui latihan-latihan yang sistematis, terarah, dan terus-menerus. Yang lebih penting lagi dengan peningkatan partisipasi siswa dalam Kopsis akan mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan generasi muda bangsa yang berjiwa demokratis, SDM yang peka terhadap permasalahan lingkungannya, mampu menghadapi era globalisasi yang kompleks dan penuh tantangan. Walaupun demikian belum semua sekolah membentuk Kopsis (Dikdasmen, 1991: 13). Banyak sekolah belum menyelenggarakan Kopsis karena mereka tidak mengetahui bagaimana cara mendirikan koperasi (Ahdyat, 1990:2). Bahkan, hasil survei ke sekolah-sekolah pada bulan April 1996 menunjukkan bahwa pelaksanaan Kopsis, baik pola pelaksanaan, daya hidupnya maupun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan dari fungsi, maksud dan tujuan Kopsis itu sendiri. Perlengkapan organisasi Kopsisnya bukan dari para siswa tetapi para guru dan karyawan. Banyak sekolah menyelenggarakan Kopsis, namun pembinanya sendiri tidak memiliki kemampuan dan ketrampilan berkoperasi (Ahdyat, 1990:2). Ini berarti para guru dan karyawan yang terdidik dan terlatih atau berpengalaman berkoperasi bukan para siswa. Keadaan yang demikian berarti pula penyelenggaraan Kopsis telah jauh dari tujuan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para siswa dalam berkoperasi, dan fungsi Kopsis sebagai laboratorium ekonomi, organisasi ekonomi siswa dan penanaman nilai-nilai kehidupan masyarakat demokratis, dan jiwa wirausahawan.

Kasus yang lain muncul bahwa pelaksanaan Kopsis bukan bertujuan meningkatkan kesejahteraan siswa tetapi sebagai wahana untuk meningkatkan

kesejahteraan para Guru dan Karyawan (hasil wawancara dengan pembina Kopsis SLTA dan SLTP Kodya Bandung, April 1996). Kondisi yang demikian juga telah menyimpang jauh dari fungsi Kopsis sebagai organisasi ekonomi siswa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Dari hasil survei itu juga diperoleh informasi bahwa secara keseluruhan partisipasi siswa SLTA dalam Kopsis di Kotamadya Bandung sangat rendah. Dari 60 siswa, ketika ditanya: "Apakah anda selalu membeli alat-alat sekolah di koperasi, memiliki simpanan sukarela di Kopsis dan mengikuti rapat anggota koperasi?" Secara keseluruhan mereka memberikan jawaban sebagai berikut: 32 siswa (53,333 %) menyatakan tidak pernah membeli peralatan sekolah dari Kopsis dan 28 siswa (46,666 %) menyatakan kadang-kadang membeli peralatan sekolah dari Kopsis; 21 siswa (35 %) pernah mengikuti rapat Kopsis dan 39 (65 %) siswa belum pernah mengikuti rapat Kopsis; 48 siswa (80 %) tidak memiliki uang simpanan sukarela dan hanya 12 siswa (20 %) yang memiliki uang simpanan sukarela. Hasil survei ini memberikan gambaran betapa rendahnya tingkat partisipasi siswa dalam Kopsis. Dari hasil survei tersebut juga diperoleh informasi bahwa 1) sebagian besar *para guru pendidikan IPS* (khususnya guru mata pelajaran ekonomi) *kurang memanfaatkan Kopsis* sebagai media proses pendidikan para siswa agar mereka melihat secara dekat, memahami pelaksanaan Kopsis yang ada, menganalisa yang menjadi permasalahan dan mencari jalan pemecahannya; 2) pada umumnya *para pembina Kopsis tidak memiliki program-program pembinaan* para siswa yang akan dilaksanakan dalam suatu periode tertentu secara jelas; 3) pada umumnya *para pembina koperasi tidak memiliki model pembelajaran dan strategi pembinaan yang kongkrit* dalam membina perilaku siswa dalam berkoperasi. Ketiga hal ini kemungkinan sekali

merupakan penyebab rendahnya partisipasi siswa dalam Kopsis. Dengan istilah lain bahwa efektivitas model pembelajaran dan metode pembinaan perilaku siswa yang diterapkan para pembina sangat mempengaruhi tingkat partisipasi siswa dalam berkoperasi, manfaat koperasi dan perkembangan Kopsis.

Uraian tersebut memberikan isyarat pemikiran masalah *seperti apa model pembelajaran dan pembinaan siswa dalam berkoperasi yang diterapkan oleh guru ekonomi dan pembina Kopsis dalam meningkatkan efektivitas partisipasi, rasa manfaat adanya Kopsis, dan perkembangan Kopsis selama ini?*

5. Posisi Penelitian Model Pembelajaran dan Metode Pembinaan Perilaku Siswa dalam Berkoperasi dalam Pendidikan IPS

Di Indonesia pengertian PIPS beragam. Para ilmuwan (khususnya di perguruan tinggi) memberikan istilah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dan Studi Sosial, sedangkan para praktisi (khususnya di sekolah-sekolah) cenderung memberikan nama kepadanya dengan istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Definisi PIPS yang banyak pendukungnya dan masih berlangsung sampai sekarang adalah definisi yang dikemukakan oleh Wesley (Barr et al., 1977:1). Menurutnya, PIPS adalah Ilmu-ilmu Sosial yang disederhanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. The thesaurus of ERIC Descriptors menyatakan "social studies consist of adaptations of knowledge from the social sciences for teaching purposes at elementary and scondary level of education." Menurut pengertian ini PIPS merupakan adaptasi pengetahuan dari Ilmu-ilmu Sosial untuk mencapai tujuan

pengajaran di tingkat sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Pengertian ini sejalan dengan 1) terminologi standar kurikulum dan pengajaran Departemen pendidikan USA, 2) piagam NCSS (dalam Barr et al., 1977:1); 3) analisa Frsesser and West (1961: 15-18) tentang pengertian social studies dari Wesley (dalam Somantri, 1994:12). Menurut *terminologi standar Kurikulum Pengajaran USA*: "The social studies are comprised of those aspects of history, economics, political science, sociology, anthropology, psychology, geography, and philosophy which in practice are selected for instructional purposes in school and colleges." Pengertian ini memberikan gambaran bahwa PIPS dipilih dari aspek-aspek sejarah, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, psikologi, geografi dan filsafat yang diterapkan untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah dan di perguruan tinggi. Menurut *piagam NCSS*: "The term of social studies ... is used to include history, economics, sociology, civics, geography, and all modifications of subjects whose content as well as aim is social." PIPS mencakup sejarah, ekonomi, sosiologi, kewarganegaraan, geografi dan semua modifikasi mata pelajaran yang isi dan tujuannya adalah sosial. Lebih lanjut NCSS (1994:3) mengemukakan:

Social studies is the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence. Within the school program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archaeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and natural science. The primary purpose of social studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world.

Menurut pengertian ini PIPS merupakan studi integratif dari Ilmu-ilmu Sosial dan humaniti untuk mempromosikan kompetensi warga masyarakat, yaitu berkembangnya generasi muda (warga masyarakat) yang memiliki kemampuan

membuat keputusan secara rasional yang penuh informasi dalam suatu masyarakat demokratis yang beraneka budaya dan dalam suatu masyarakat dunia yang interdependent. PIPS dalam program sekolah tidak hanya mencakup seluruh bidang ilmu yang dikategorikan sebagai ilmu sosial (antropologi, archeologi, ekonmi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, politik, psikologi, agama dan sosiologi) tetapi bahkan menjangkau isi bidang humaniti, matematik dan ilmu-ilmu pengetahuan alam yang relevan untuk mempromosikan kompetensi warga masyarakat. Sedangkan *Fresser and West* menerangkan perbedaan PIPS dengan Ilmu-Ilmu Social sebagai berikut:

The social sciences are systematically organized, scholarly bodies of knowledge that have been built up through intellectual inquiry and planned research. These logically organized bodies of knowledge are susceptible of study by persons of intellectual maturity. The social studies on the other hand, consist of materials selected from the social sciences and organized for the instruction of children and youth. The distinction is between systematically structured bodies of scholarly content and a psychologically structured selection of instructional content.

Dalam analisa ini dapat dimengerti bahwa PIPS adalah materi pelajaran yang diseleksi dari Ilmu-ilmu Sosial dan diorganisir untuk memberikan pengajaran kepada generasi muda. Perbedaannya dengan Ilmu-ilmu Sosial adalah bahwa PIPS merupakan materi yang diseleksi dan disusun secara psikologis dari Ilmu-ilmu Sosial sebagai isi pengajaran, sedangkan Ilmu-ilmu Sosial merupakan pengetahuan yang dirstrukturkan secara sistematis dari konsensus para ilmuwan sosial. Inti dari pengertian-pengertian tersebut bahwa PIPS adalah mata pelajaran yang diambil dari disiplin Ilmu-ilmu Sosial yang disederhanakan, diadaptasi, dimodifikasi, diseleksi, diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologis yang dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada generasi muda. Semua inti dari

pengertian PIPS itu kemudian diserap, diadaptasi dan dimodifikasi oleh para pakar PIPS di Indonesia. Menurut hasil pertemuan HISPIPSI ke-I di IKIP Bandung tahun 1990, yang kemudian dikembangkan dalam 4 makalah HISPIPSI pada Forum Komunikasi Pimpinan FPIPS di FPIPS-IKIP Yogyakarta tahun 1991, IKIP Padang tahun 1992, IKIP Ujung Pandang tahun 1993, IKIP Surabaya tahun 1994 dan pertemuan ilmiah di FPIPS IKIP Malang tahun 1994 (dalam Somantri, 1995:1-4) bahwa PIPS pada intinya adalah seleksi dari disiplin Ilmu-ilmu Sosial dan humaniora yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Lebih terurai lagi Somantri (1994:1) mengemukakan bahwa PIPS adalah suatu program pendidikan yang memilih bahan pendidikan dari disiplin Ilmu-ilmu Sosial dan humaniti, yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan.

Pengertian PIPS yang dikemukakan oleh para pakar Indonesia tersebut berarti bahwa orientasi PIPS Indonesia adalah orientasi seleksi disiplin Ilmu-ilmu Sosial dan humaniora serta orientasi disiplin ilmu-ilmu pendidikan yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Dari orientasi PIPS ini, ketua HISPIPSI, Somantri (1995: 3) menjelaskan sebagai berikut: kata seleksi dimaksudkan agar kita dapat memilih teori-teori, generalisasi-generalisasi terpenting dari Ilmu-ilmu Sosial dan humaniora untuk keperluan pendidikan. Selain itu kata seleksi juga dimaksudkan untuk menempatkan teori-teori Ilmu-ilmu Sosial itu secara proporsional untuk kepentingan dan tujuan tertentu, karena memang PIPS tidak berarti tidak mempelajari dan mendalami 'struktur' disiplin Ilmu-ilmu Sosial di Universitas. Disiplin Ilmu-ilmu pendidikan yang dimaksudkan terutama pada konsep-konsep psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, teori-teori belajar, dan segala

sesuatu yang berkenaan dengan proses pendidikan. Kata diorganisir dan disajikan secara ilmiah, menunjukkan bahwa PIPS tidak hanya mengikuti sepenuhnya garis berfikir ilmuwan sosial seperti ilmuwan sosial di Universitas, tetapi juga harus mampu mengorganisir dan menyajikan bahan pendidikan (yang diseleksi dari Ilmu-ilmu Sosial) secara psikologis untuk tujuan pendidikan baik di tingkat perguruan tinggi (JPIPS di Universitas dan FPIPS di IKIP), pendidikan dasar maupun pendidikan menengah dan bahkan di masyarakat demi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Proses pembelajaran PIPS di sekolah dasar Indonesia dilakukan secara terintegrasi, walaupun masih dijadikan dua kelompok: PPKN dan IPS. Sedangkan di sekolah menengah ke atas proses pembelajaran dilakukan secara per disiplin ilmu. Di Amerika pembelajaran PIPS dilakukan secara "integrated and single configurations" (NCSS, 1994: ix). Lebih lanjut NCSS (1994: ix) mengemukakan:

A metaphor helps to illustrate the relationship between social studies and specific individual disciplines. Consider a music ensemble such as orchestra (the social studies program) as it performs a specific musical composition (a single level or specific course within the curriculum). At certain times, one instrument (a discipline such as history) takes the lead while others (such as geography and economics) play supporting roles. At other times, several instruments (history, geography, economics) play together on equal basis to explore the composer's thematic aims. The quality of the performance is the result of the composer's writing of the music (design of the social studies curriculum), the unique qualities of individual instruments (the contribution of individual disciplines), the acoustics of the setting (expertise of the curriculum planners and teachers, school sites facilities, and instructional resources), and the skills of musicians and conductor (the abilities of the students, teachers, and program planners).

Sedangkan cakupan Ilmu-ilmu Sosial yang dimaksudkan dalam PIPS menurut masing-masing negara dan pakar PIPS berbeda-beda. Ministry of education, Victoria (1987:11) memasukan cakupan Ilmu-ilmu Sosial ke dalam PIPS dalam memberikan

pendidikan dan pengajaran di sekolah sebagai berikut: sejarah, psikologi, geografi, antropologi, politik, sosiologi dan ekonomi. Sejak tahun ajaran 1995, Pemerintah Federal Australia memberlakukan istilah PIPS dari "Social Education" ke "Studies of Society and Environment". Berdasarkan nama PIPS yang baru ini Pemerintah Federal Australia mensyaratkan, di samping disiplin-disiplin Ilmu-ilmu Sosial tersebut, ekologi dimasukkan ke dalam PIPS di sekolah-sekolah untuk seluruh negara bagian (Educational Board, Australia, 1994:3). Sedangkan dalam Terminologi Standar Kurikulum dan Pengajaran Departemen Pendidikan Amerika isi PIPS terdiri dari disiplin Ilmu-ilmu Sosial: sejarah, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, psikologi, geografi dan filsafat (Barr et al., 1977: 2). Namun NCSS Amerika (1994:3) mengemukakan:

Within the school program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archaeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and natural science.

Dari ungkapan tersebut nampak bahwa cakupan isi PIPS di USA yang sekarang ini sangat luas. Tidak hanya mencakup sejarah, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, psikologi, geografi dan filsafat, tetapi juga mencakup hukum, agama dan bahkan mencakup isi humaniti, matematik dan ilmu pengetahuan alam yang relevan.

Untuk di Indonesia isi materi PIPS (yang pada tingkat sekolah dasar dan menengah disebut IPS) terdiri PMPKN, geografi, sejarah, antropologi, sosiologi dan ekonomi (serta ekologi walaupun disiplin ini masih belum berdiri sendiri, namun diharapkan dimasukkan ke dalam proses pembelajaran pada semua bidang ilmu yang dimungkinkan untuk itu). Menurut pakar PIPS Kennedy (1991:35) bahwa isi PIPS harus diambil dari humaniti dan disiplin Ilmu-ilmu Sosial: sejarah geografi, politik,

ekonomi, antropologi dan sosiologi. Woolever and Scott (1988: 105) mengemukakan bahwa isi materi PIPS terdiri dari 8 (delapan) disiplin Ilmu-ilmu Sosial yaitu antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, filsafat, politik, psikologi, dan sosilogi.

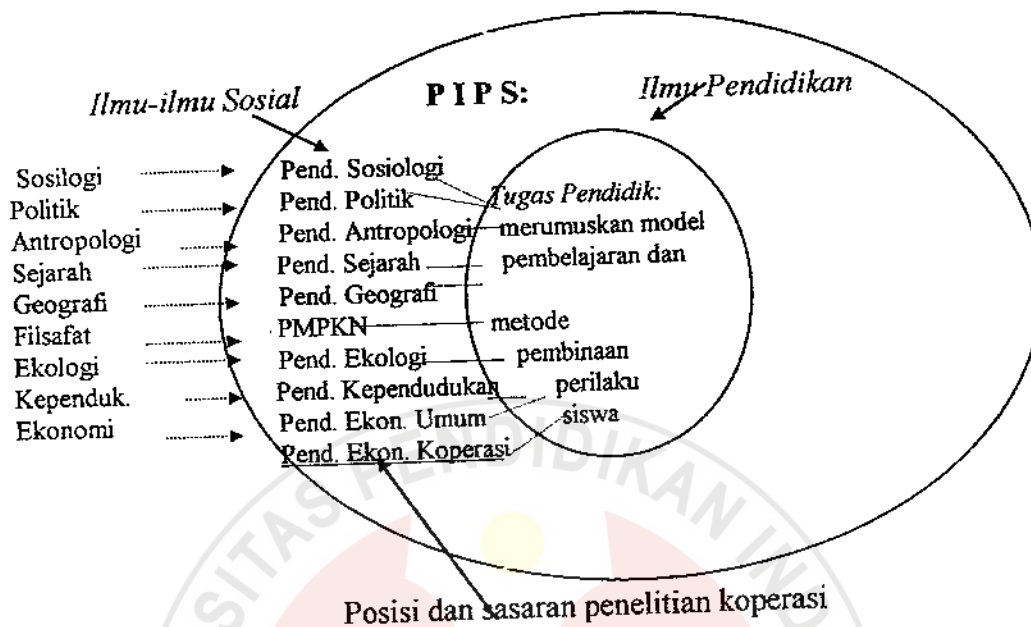
Berdasarkan cakupan isi materi PIPIS tersebut baik yang dikemukakan oleh para pakar maupun yang berlaku di beberapa negara menunjukkan bahwa disiplin ekonomi merupakan isi bagian PIPS yang tak tertinggalkan. Di Indonesia bidang ekonomi ini mencakup di dalamnya ekonmi koperasi. Bahkan ekonomi koperasi mendapat perhatian secara khusus sebagai bahan pengajaran baik di sekolah maupun di perguruan tinggi.

Sesuai dengan pengertian bahwa PIPS merupakan program pendidikan yang menyeleksi bahan pendidikan dari disiplin Ilmu-ilmu Sosial dan humaniti yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan tersebut menggambarkan bahwa disiplin ekonomi merupakan bagian isi-isi bahan pendidikan yang dipilih, diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk mencapai tujuan pendidikan. Bahan pengajaran ekonomi mencakup di dalamnya bahan pengajaran ekonomi koperasi sehingga bidang yang terkhir ini termasuk bahan pengajaran yang perlu dipilih, diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk mencapai tujuan pendidikan.

Secara umum tujuan PIPS adalah terbentuknya warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memiliki pengetahuan, ketrampilan memproses informasi, nilai dan keyakinan dan berkemampuan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat (Barr, 1977: 69; Chappin and Messick, 1989: 4; Ministry of Education, Victoria, 1987:4; Carter, 1991:23; NCSS, 1994:7). Sedangkan tujuan PIPS dilihat dari tujuan pendidikan ekonomi menurut Anwar (1993, 1994:2) bahwa pendidikan

ekonomi tidak hanya mengarah kepada penguasaan prinsip-prinsip ekonomi sebagai ilmu dan disiplin akademik, melainkan juga inheren di dalamnya adalah pembentukan kesadaran nilai-nilai ekonomis, yaitu cara berfikir, bersikap, dan bertindak dengan berorientasi kepada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, produktivitas dalam kerangka tatanan nilai yang lebih tinggi. Lebih khusus lagi adalah tujuan pendidikan ekonomi koperasi. Dimana tujuan pendidikan bidang ini adalah pembentukan jiwa berkoperasi atau kesadaran berkoperasi yaitu tertanamnya nilai-nilai demokrasi ekonomi dan timbulnya kesadaran partisipasi diri peserta didik dalam koperasi (Ditjen Dikdasmen, 1991). Ini berarti bahwa, pendidik IPS ekonomi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memilih, mengorganisir dan menyajikan bahan pendidikan yang diambil dari disiplin ekonomi secara ilmiah dan psikologis, apabila diinginkan usaha pencapaian tujuan pendidikan ekonomi (koperasi) tersebut bisa tercapai secara efektif dan efisien. Dengan kata lain pendidik ekonomi (termasuk pendidik ekonomi koperasi) perlu mengusahakan dan menggunakan suatu model pembelajaran ekonomi yang efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuannya. Apalagi bidang pendidikan ekonomi koperasi (yang dalam penelitian ini peneliti sebut dengan istilah 'pendidikan koperasi'), yang menurut penjelasan UUD'45 koperasi mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan ekonomi di Indonesia, para pendidik koperasi perlu lebih mengusahakan model pembelajaran dan metode pembinaan perilaku siswa dalam berkoperasi secara efektif dan efisien. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pendidikan koperasi bisa tercapai secara maksimal. Model pembelajaran dan metode pembinaan perilaku siswa dalam berkoperasi yang diusahakan dan diterapkan oleh para guru dan pembina Kopsis inilah yang akan dikaji dalam penelitian ini. *Posisi penelitian tentang model pembelajaran dan*

metode pembinaan perilaku siswa dalam berkoperasi dalam kerangka PIPS dapat diilustrasikan pada gambar 1.



Gambar 1: Posisi Sasaran Penelitian Pendidikan Koperasi dalam Ilmu-ilmu Sosial, Ilmu-ilmu Pendidikan dan PIPS.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pemahaman para pakar tentang apa hakekat PIPS sangat bervariasi. Pemahaman tersebut menimbulkan berbagai pemahaman tentang fungsi PIPS dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Variasi pemahaman di antara para pakar tentang fungsi PIPS dalam mencapai sasaran dan tujuannya dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok tradisi PIPS yaitu a) *Social Studies Taught as Citizenship Transmission*, b) *Social Studies Taught as Social Science*, dan c) *Social Studies Taught as Reflective Inquiry* (Barr et.al., 1977: 59-71) Lihat Tabel 1.

TABEL 1 CIRI-CIRI 3 TRADISI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

	SOCIAL STUDIES TAUGHT AS CITIZENSHIP TRANSMISSION	SOCIAL STUDIES TAUGHT AS SOCIAL SCIENCES	SOCIAL STUDIES TAUGHT AS REFLECTIVE INQUIRY
Tujuan	Mentransmisikan konsep tentang masyarakat dan warganegara yang dianggap ideal kepada generasi muda.	Terlatihnya generasi muda dalam pembuatan keputusan yang didasarkan pada penguasaan konsep-konsep Ilmu-ilmu Sosial, proses-proses dan problem-problem yang biasa diterapkan oleh ilmuwan sosial.	Diperolehnya bekal pengetahuan bagi para generasi muda sebagai dasar untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah melalui proses inkuiri
Materi	Nilai-nilai, norma dan keyakinan yang diharapkan diterima, diinternalisasi, ditaati untuk digunakan sebagai kerangka pembuatan keputusannya dan dilakukan sebagai gambaran warga negara yang baik. Materi pelajaran dipilih oleh para penguasa dan diinterpretasi oleh para guru dan memiliki fungsi untuk mengilustrasikan nilai-nilai, keyakinan, dan sikap yang ideal sebagai gambaran konsep ideal warga negara yang baik.	Isi materi pembelajaran yang tepat adalah berupa struktur, konsep, problem, dan proses baik disiplin ilmu sosial yang terpisah maupun terintegrasi.	Materi berupa problem-problem sosial yang teridentifikasi dan terpilih oleh para siswa sebagai problem
Metode	Mentransmisikan konsep-konsep dan nilai-nilai dengan menggunakan strategi dan teknik seperti textbook, hafalan, perkuliahan, tanya jawab dan pelaksanaan <i>problem solving</i> baik secara terstruktur maupun mandiri.	Menerapkan metode yang cocok dengan disiplin ilmu sosial yang bersangkutan.	Mentraining berbagai ketrampilan inkuiri kepada generasi muda tentang pembuatan pilihan dan keputusan secara sengaja dalam memecahkan masalah.

6. Filsafat yang Diterapkan dan PIPS - ekonomi Koperasi yang Dimaksudkan pada Penelitian.

PIPS - ekonomi koperasi yang dimaksudkan pada penelitian ini lebih mengacu kepada "*Social Studies Taught as Citizenship Transmission*." Sedangkan pemikiran filosofis yang diterapkan dalam kajian ini adalah rekonstruksionisme.

Dengan alas pemikiran, *pertama*, koperasi telah menjadi bagian keyakinan dari sistem ekonomi bangsa Indonesia (sebagaimana termaktub dalam pasal 33

UUD'45) yang perlu ditanamkan kepada generasi muda. *Kedua*, bahwa tujuan pendidikan ekonomi (koperasi) adalah tidak hanya mengarah kepada penguasaan prinsip-prinsip ekonomi (koperasi) tetapi yang lebih penting adalah pembentukan kesadaran nilai-nilai ekonomis dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak dengan beorientasi kepada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas dalam kehidupan (khususnya dalam kehidupan berekonomi dan berusaha). Selain itu tujuan pendidikan ekonomi koperasi juga diarahkan kepada penanaman nilai-nilai demokrasi ekonomi dan peningkatan kesadaran berkoperasi atau peningkatan partisipasi siswa dalam koperasi. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka konsep-konsep, nilai-nilai, keyakinan, prinsip-prinsip, hakekat, fungsi, manfaat dan tujuan koperasi perlu ditransmisikan kepada peserta didik. Dengan harapan mereka menginternalisasi nilai dan keyakinan tentang kebenaran koperasi, yang akhirnya menjadi bagian dari pola fikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupannya.

Namun nilai-nilai yang perlu ditanamkan kepada peserta didik tidak boleh kaku dan atas dasar-nilai mati semata. Dalam beberapa hal nilai yang ditanamkan itu harus dinamis, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Dengan alasan pemikiran bahwa dalam era informasi yang semakin menggelobal, walaupun nilai-nilai lama yang bersifat mendasar masih tetap berlaku di masyarakat tetapi bentuk dan sifatnya nilai-nilai tersebut selalu mengalami transformasi untuk menyesuaikan tuntutan masyarakat dan zaman yang selalu berubah. Seperti, dulu sasaran utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, kurang perhatian kearah pencarian keuntungan, namun sekarang sesuai dengan program pemerintah koperasi itu tidak hanya mementingkan kesejahteraan anggota dan mengesampingkan keuntungan tetapi lebih dari itu yaitu merupakan lembaga usaha menuju kearah profit

sharing. Proses pembelajaran dan pembinaan juga harus adaptif atas pikiran-pikiran baru. Tanpa transformasi nilai-nilai yang dirasa sudah kurang adaptif untuk diterapkan dengan tuntutan zaman, masyarakat akan ketinggalan dan tergilas oleh zaman. Oleh karena itu pemikiran filosofis yang diterapkan dalam pembelajaran dan pembinaan siswa dalam berkoperasi adalah *pemikiran filosofis rekonstruksionisme*. Dimana arah pendidikan nilai-nilai koperasi dan proses pembelajarannya terhadap peserta didik, perlu diarahkan, bukan berdasarkan nilai-nilai lama koperasi dan pemikiran pendidikan yang dogmatis tetapi berupa pemikiran pendidikan dan nilai-nilai koperasi yang fungsional.

B. MASALAH PENELITIAN

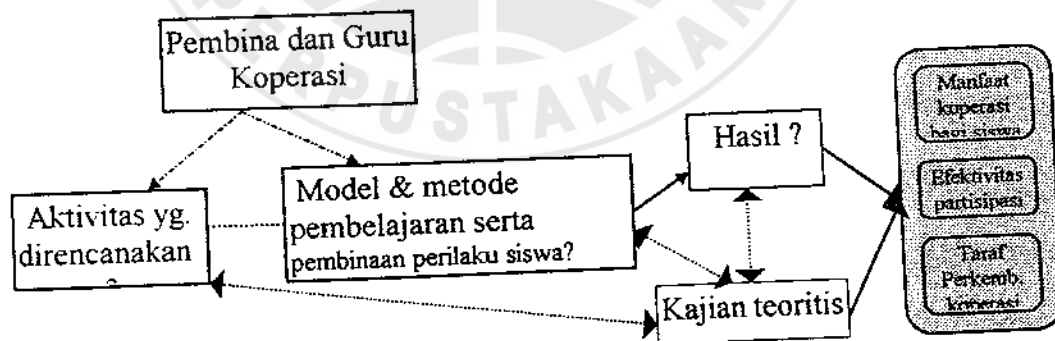
Gambaran di atas menunjukkan bahwa partisipasi anggota (siswa) sangat mempengaruhi atau merupakan indikator penting bagi keberhasilan Kopsis dalam mencapai fungsi dan tujuannya. Namun hasil pra survei pada bulan April 1996 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas partisipasi siswa dalam Kopsis sangat rendah. Partisipasi anggota dalam koperasi sangat menentukan perkembangan dan keberhasilan koperasi (Subyantoro, 1993:17) Tinggi-rendahnya tingkat efektivitas partisipasi siswa dalam Kopsis akan mempengaruhi tingkat tinggi-rendahnya keuntungan atau manfaat yang diterima para siswa. Rendahnya partisipasi siswa menggambarkan rendahnya manfaat yang diterima siswa (anggota koperasi). Rendahnya manfaat yang diterima siswa berarti rendahnya pencapaian tujuan dan fungsi Kopsis yaitu meningkatkan kesejahteraan siswa dan menempatkan Kopsis sebagai wahana pendidikan dan latihan siswa berwirausaha, dan penanaman nilai-nilai demokrasi. Agar Kopsis dapat mencapai tujuan dan fungsinya, perlu diusahakan

suatu model pembelajaran dan pembinaan siswa dalam berkoperasi yang mampu meningkatkan efektivitas partisipasi siswa dalam Kopsis, baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, baik dari segi program, metode, prosedur maupun teknik pelaksanaannya. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan: Model pembelajaran dan metode pembinaan seperti apa yang telah diusahakan dan diterapkan oleh para pembina dan guru Ekonomi-koperasi dalam meningkatkan efektivitas partisipasi siswa dalam Kopsis selama ini? Sejauh mana dampak model pembelajaran dan metode pembinaan perilaku yang telah mereka lakukan? Untuk lebih jelasnya penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi Kopsis dan pembelajaran serta pembinaan berkoperasi yang ada dewasa ini? Mengapa terjadi demikian?
2. Program atau aktivitas-aktivitas pembelajaran seperti apa yang secara aktual diusahakan dan direncanakan oleh para guru dan pembina Kopsis dalam meningkatkan efektivitas partisipasi siswa (anggota dan pengurus) dalam Kopsis?
 - a. Seperti apa rencana pembelajaran yang direncanakan oleh para guru mata pelajaran ekonomi dalam meningkatkan efektivitas partisipasi siswa dalam berkoperasi?
 - b. Program-program apa yang diusahakan oleh para pembina koperasi dalam meningkatkan efektivitas partisipasi siswa dalam berkoperasi di luar kelas?
3. Seperti apa model pembelajaran dan metode pembinaan perilaku yang diusahakan dan diterapkan oleh para guru dan pembina Kopsis dalam mengaplikasikan rencana-rencana peningkatan efektivitas partisipasi siswa dalam berkoperasi?

- a. Model pembelajaran yang seperti apa yang diterapkan oleh para guru ekonomi koperasi dalam proses pembelajaran di kelas?
 - b. Metode pembelajaran dan pembinaan perilaku yang mana yang diterapkan oleh para pembina Kopsis dalam melaksanakan kegiatan tersebut di luar kelas?
4. Seberapa jauh hasil pembelajaran dan pembinaan perilaku siswa telah dicapai dengan program, model pembelajaran dan metode pembinaan yang telah diterapkan oleh para guru ekonomi dan pembina Kopsis terhadap: (a) rasa manfaat Kopsis bagi siswa, (b) tingkat partisipasi siswa dalam berkoperasi, dan (c) perkembangan Kopsis?

Setelah diperoleh data dari lapangan, *keempat masalah tersebut dianalisa atas dasar kajian teori*. Kajian teori ini mencakup teori kepemimpinan, teori partisipasi dalam koperasi, manfaat koperasi, perkembangan koperasi, teori perilaku, teori belajar, teori pendidikan, model pembelajaran, program pembelajaran dan metode pembinaan.



Gambar 2: Ilustrasi Keterkaitan Masalah Penelitian dengan Kajian Teoritis.

Keterangan:

- > : membuat
- > : menerapkan
- > : dikaji dan dipertimbangkan
- > : berdasarkan
- > : menghasilkan

Berdasarkan teori-teori tersebut peneliti melihat program pembelajaran yang seharusnya mereka usahakan dan terapkan, model pembelajaran dan metode pembinaan yang seharusnya mereka terapkan, dan hasil pembelajaran dan pembinaan siswa yang telah mereka lakukan pada segi *efektivitas partisipasi siswa*: apakah partisipasi mereka dalam kategori *magical conforming stage*, *naïve reforming stage* atau *critical trans-forming stage* (lihat penjelasan tingkat partisipasi halaman 55); *manfaat koperasi bagi siswa* baik dari segi ekonomi maupun non ekonomi, dan *taraf perkembangan koperasi*: apakah perkembangan koperasi itu berada dalam kategori pembentukan, pertumbuhan, pengembangan. Keterkaitan ketiga masalah dan kajian teoritis tersebut dapat diilustrasikan pada gambar 2.

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. memperoleh gambaran tentang
 - a. kondisi Kopsis dan penyelenggaraan pembelajaran serta pembinaan siswa dalam berkoperasi.
 - b. program pembelajaran siswa dan pembinaan perilaku siswa yang diusahakan oleh guru ekonomi dan pembina Kopsis dalam meningkatkan efektivitas partisipasinya.
 - c. model pembelajaran dan metode pembinaan perilaku siswa yang diterapkan oleh guru dan pembina Kopsis dalam meningkatkan efektivitas partisipasinya.
 - d. hasil yang dicapai dengan program, model dan metode pembelajaran serta pembinaan perilaku siswa dalam berkoperasi yang diterapkan (pada

- persepsi, kognisi, motivasi, sikap, rasa manfaat, partisipasi dan perkembangan Kopsis).
2. menganalisa dan mengevaluasi model pembelajaran dan pembinaan siswa ber-koperasi yang diterapkan oleh para pembina Kopsis dan guru ekonomi dalam meningkatkan rasa manfaat, rasa percaya, partisipasi dan perkembangan Kopsis
 3. memperoleh model teoritik pembelajaran dan pembinaan siswa dalam berkoperasi.

C. KEGUNAAN DARI HASIL PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menambah keluasan dan kedalaman segi-segi keilmuan baik bagi ilmuwan maupun praktisi tentang model pembelajaran Ekonomi-koperasi dalam meningkatkan efektivitas partisipasi siswa dalam berkoperasi yang selama ini telah diupayakan oleh para guru dan pembina baik yang berkenaan dengan program, model dan metode pembelajaran serta pembinaan perilaku yang dipilih dan diterapkan.
- b. Memberikan gambaran model pembelajaran dan pembinaan dalam meningkatkan efektivitas partisipasi siswa dalam Kopsis
- c. Mendorong penelitian lebih lanjut tentang kehidupan dan kegiatan Kopsis.

2. Manfaat Praktis

- a. Diperolehnya gambaran dari hasil penelitian tentang model pembelajaran koperasi dan metode pembinaan perilaku yang mampu meningkatkan efektivitas

partisipasi siswa dalam Kopsis yang diterapkan di berbagai sekolah dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda, dapat dirumuskan model teoritis pembelajaran ekonomi dan metode pembinaan perilaku yang mampu meningkatkan efektivitas partisipasi siswa dan pengembangan Kopsis yang efektif. Model pembelajaran dan metode pembinaan ini akan berguna sebagai dasar berpijak bagi para guru dan pembina generasi muda (Bidang Binmudora Depdikbud, kepala sekolah, pembina Kopsis dan instansi lain yang terkait) dalam menentukan kebijakan tentang model pembelajaran, pembinaan dan pengembangan Kopsis dan pembinaan dan pengembangan kemampuan para guru dan pembina Kopsis di masa mendatang dalam mencari, memilih, menentukan dan menerapkan model pembelajaran Ekonomi (koperasi) dan metode pembinaan perilaku yang mampu meningkatkan efektivitas partisipasi siswa dan pengembangan Kopsis. Mengingat, *pertama*, efektivitas partisipasi siswa dalam Kopsis sangat perlu dibina dan diupayakan oleh para guru dan pembina Kopsis dengan model pembelajaran dan metode pembinaan perilaku yang efektif, apabila diinginkan penanaman nilai-nilai kehidupan demokrasi ekonomi, semangat berkoperasi, jiwa wirausaha, dan pemasyarakatan koperasi kepada generasi muda dapat tercapai. *Kedua*, keberhasilan peningkatan efektivitas partisipasi siswa merupakan kunci keberhasilan pencapaian tujuan, fungsi dan pengembangan Kopsis.

- b. Dengan diperolehnya gambaran tentang aneka ragam program yang diusahakan dan diterapkan, model pembelajaran, metode pembinaan perilaku siswa yang dipilih dan diterapkan, dan hasil yang dicapai oleh masing-masing Kopsis, maka hasil penelitian ini sangat berguna bagi para pembina generasi muda, kepala

sekolah, guru dan pendidik lainnya dalam merumuskan kebijakan, program yang diusahakan, model pembelajaran dan pembinaan siswa, metode pembinaan dan atau strategi pendidikan koperasi dalam meningkatkan efektivitas partisipasi siswa yang diambil dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi (ekonomi), semangat berkoperasi, jiwa wirausaha, dan memasyarakatkan koperasi kepada generasi muda.

E. ASUMSI PENELITIAN

Asumsi-asumsi yang mendasari pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keberhasilan penyelenggaraan sekolah (termasuk Kopsis) sangat dipengaruhi oleh perilaku kepemimpinan kepala sekolah (Usman, 1996:196; Depdikbud, 1981:44; Asmara,1984:201)
2. Keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah (termasuk dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan Kopsis) sangat tergantung pada dirinya, pengikut, dan situasinya (Depdikbud, 1981:44; Hersey dan Blanchard, 1993: 123)
3. Kepala sekolah, pembina Kopsis, guru dan instansi terkait merupakan individu-individu yang bertanggung jawab terhadap kemajuan dan perkembangan penyelenggaraan Kopsis (Depkop, 1987/1988; SKB Mendagri, Mendikbud dan Menkop nomor 125/M/KPTS/X/1984)
4. Pemanfaatan Kopsis sebagai lab ekonomi/media pembelajaran ekonomi, latihan berkoperasi dan berwirausaha serta dilaksanakan sebagai kokurikuler dan ekstrakurikuler akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi siswa dalam

berkoperasi (Depkop Direktorat Jendral Bina Koperasi, 1987/1978; Depdikbud Ditjen Dikdasmen Direktorat Pembinaan Kesiswaan, 1991)

5. Penerapan model dan metode pembelajaran serta pembinaan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik individu siswa akan meningkatkan hasil pembelajaran dan pembinaan secara maksimal (Glickman, 1981:40; Gagne and Briggs, 1977; 1979; Gagne, Briggs & Wager, 1988).
6. Efektivitas partisipasi siswa (anggota) berkoperasi sangat ditentukan oleh tingkat kesesuaian saling pemenuhan harapan anggota dan Kopsis (Ropke, 1989:106-108 dan Wirasasmita, 1993)
7. Perilaku individu terhadap sesuatu sangat dipengaruhi oleh kualitas persepsi, kognisi, motivasi dan sikap yang dimilikinya (Litterer, 1980; Kretch et.al., 1982: 139-140; Nimpuno, 1993; Baron, 1986:97-175; Milton, 1981:7; Subyantoro, 1993: 189)
8. Perubahan perilaku (partisipasi) individu akan terjadi apabila (pembina Kopsis dan Guru) berupaya modifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. (Robin, 1996:33; Litterer, 1980; Kretch dkk., 1982: 139-140; Nimpuno, 1993; Baron, 1986:97-175; Milton, 1981:7; Subyantoro, 1993: 189-190)
9. Tingkat persepsi, kognisi, motivasi dan sikap individu (siswa) terhadap Kopsis sangat dipengaruhi oleh rasa manfaat Kopsis bagi siswa (Subyantoro, 1993: 189)
10. Pembelajaran dan pembinaan perilaku siswa (berkoperasi) yang efektif menuntut pelaksanaan yang terpadu antara pemberian pengetahuan konseptual dan praktik lapangan (Freire, 1971; Dewey, 1916)